

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa: Peran Partisipasi Masyarakat, Kualitas Pengelola Serta Transparansi

A. Reski Fausia Putri¹, Ifah Finatry Latiep², Nur fajri Irvan^{3*}, Roni Herison⁴

^{1,2} Program Studi Bisnis Digital, Universitas Megarezky

³ Program Studi Bisnis Digital, STIE Amkop Makassar

⁴ Program Studi Kewirausahaan, STIE Amkop Makassar

Abstrak

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Kualitas Pengelola Terhadap Efektivitas Pengelolaan ADD Melalui Transparansi Di Kecamatan Galesong Setatan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini adalah Kuantitatif dengan desain penelitian yang digunakan yaitu *Survey Research* serta menggunakan pendekatan *Cross Sectional*. Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar pada bulan Januari sampai Februari dengan 143 responden sebagai jumlah sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *probability sampling* dengan menggunakan teknik *accidental sampling*. Metode analisis yang diambil oleh peneliti yaitu "Analisis Jalur / *Path Analysis*. Partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan mampu mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai pengelolaan ADD yang ada di desanya. Semakin bagus partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan yang ada maka pengelolaan add yang ada pun akan semakin baik. Ditambah dengan adanya transparansi di tengah masyarakat membuat semua pengelolaan add menjadi lebih jelas dan terarah di kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Kata Kunci: *Anggaran Dana Desa; Partisipasi Masyarakat; Kualitas Pengelola, Efektifitas Pengelolaan.*

Abstract

The purpose of this study was to analyze and determine the effect of Community Participation and Management Quality on the Effectiveness of ADD Management through Transparency in Galesong Setatan District, Takalar Regency. This type of research is quantitative with the research design used is Survey Research and uses a Cross Sectional approach. This research was conducted in Galesong District, Takalar Regency from January to February with 143 respondents as the total sample. Sampling in this study using probability sampling using accidental sampling technique. The analytical method taken by the researcher is "Path Analysis. Community participation and the quality of management are able to influence the community's perception of ADD management in their village. The better the community participation and the quality of the existing management, the better the existing add management will be. Coupled with the existence of transparency in the community, making all add management clearer and more focused in the Galesong sub-district, Takalar Regency.

Keywords: *Village Fund Budget; Society participation; Management Quality, Management Effectiveness*

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya (Akil Rahman, 2016).

Partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya. Partisipasi masyarakat adalah masyarakat terlibat ikut serta pada proses pengidentifikasian permasalahan dan potensi yang ada pada masyarakat, memilih, serta mengambil mengenai solusi paling alternatif dalam menangani permasalahan, melaksanakan upaya memecahkan permasalahan serta terlibat dalam proses evaluasi perubahan yang terjadi (Muslimin, 2012).

Pengelola merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan menjalankan fungsi organisasi. Pengelola dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pengelolaan dalam organisasi, seperti yang dikemukakan oleh Mathis (2002) yang menyebutkan bahwa nilai pengelola dipengaruhi oleh penggunaan kemampuan atau keahlian (kompetensi) yang dimiliki oleh manusia ketika melakukan suatu pekerjaan dengan semaksimal mungkin tanpa melihat latar belakang untuk mengembangkan kompetensi mereka.

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

Dengan Alokasi Dana Desa yang dititikberatkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya alokasi dana desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Transparansi publik adalah suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007). Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Besarnya ADD di Kecamatan Galesong Selatan yang direalisasikan di setiap desa untuk kepentingan program pembangunan, dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa sebagian besar alokasi danadesa tersebut hanya diprioritaskan untuk kepentingan proyek pembangunan fisik yakni perbaikan infrastruktur. Dari data ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang didapat dari ADD dalam pemenuhan kebutuhan

pokok masyarakat masih sangat minim, di pihak lain penggunaan dana tersebut belum mendapatkan pengawasan dari masyarakat dalam proses pengelolaannya. Proses pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penggunaan dana ADD sangat penting dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari berbagai penyelewengan, penyimpangan, yang terjadi dalam penggunaan dana ADD tersebut. Belum berfungsinya penyelenggaraan pembangunan desa secara maksimal disebabkan karena proses dan mekanisme seperti Musrebang, usulan perencanaan proyek, Implementasi kegiatan proyek serta realisasi dari penggunaan dana ADD sebagaimana dimaksud dalam berbagai aturan dan ketentuan yang berlaku belum dilaksanakan secara baik.

Kabupaten Takalar khususnya di Kecamatan Galesong selatan terdapat 12 desa yaitu, Desa Bentang, Desa Bontokanang, Desa Sawakang, Desa Mangindara, Desa Bontokassi, Desa Barammase, Desa Bontomarannu, Desa Popo, Desa Torawang, Desa Kadatong, Desa Kalebentang, dan Desa Kalukubodo. adapun transparansi anggaran desa yang dilakukan oleh Pemerintah di Kecamatan Galesong Selatan dengan cara memasang papan informasi RAPB Desa di dalam ruang kantornya.

Dari uraian di atas, maka penelitian di Kecamatan Galesong Selatan bertujuan untuk mengetahui apakah ada kasus yang sama berkaitan dengan dana desa sekaligus sebagai informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengetahuan akan dana desa serta terfokus pada transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dengan adanya transparansi diharapkan dapat mengetahui pengelaran dana desa selama ini dan masyarakat juga dapat ikut dalam mengawasi pengeluaran dana desa. Pemerintah yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik karena erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat luas dengan menerapkan prinsip good governance pemerintah dan masyarakatnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan pada uraian Latar belakang yaitu belum efektifnya pengelolaan ADD yang ditandai dengan masih adanya kecurangan dalam pengelolaan di Kecamatan Galesong Selatan.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan lalu diinterpretasikan. Dengan menggunakan pendekatan *Cross Sectional* yaitu metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti pengaruh antar variabel.

Adapun Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Sedangkan Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2021.

Arikunto dalam penelitian Herison et al., (2021) menjelaskan bahwa populasi adalah sekumpulan individu atau objek penelitian yang memiliki kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan berdasarkan kualitas dan ciri- ciri tersebut. Penelitian ini mengambil populasi Badan Pengawasan Desa (BPD), dan kepala dusun untuk mewakili masyarakat yang ada di setiap-setiap desa. Dengan total keseluruhan BPD 83 orang dan jumlah dusun ada 60 di Kecamatan Galesong Selatan. Jadi jumlah keseluruhan populasi yaitu 143 orang.

Sampel menurut Sujarweni (2016) adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian, sehingga untuk menentukan

jumlah sampel maka peneliti mengambil sampel berdasarkan jumlah keseluruhan populasi yakni sebesar 143 orang. Dari jumlah populasi tersebut maka teknik penarikan sampel dengan menggunakan metode sampling jenuh, dimana menurut Sugiyono (2016) yakni penentuan sampel apabila populasi sedikit, maka jumlah populasi yang ada dapat dijadikan sebagai jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini. Sehingga mengacu dari definisi tersebut diatas maka jumlah sampel ditentukan sebanyak 143 orang responden.

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan menjadi indikator empiris yang meliputi sebagai berikut :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Pengukuran
1	1. Partisipasi Masyarakat (X1)	1) Sumbangan Pemikiran Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan 2) Sumbangan tenaga masyarakat dalam gotong royong 3) Sumbangan dana dalam swadaya masyarakat 4) Memelihara hasil-hasil pembangunan	Skala Likert
2	Kualitas Pengelola (X2)	1) knowledge 2) Skills 3) Experience 4) Abilities	Skala Likert
3	Transparans (Y1)	1) Sistem Pemberian Informasi Pada Publik 2) Adanya Mekanisme Yang Memfasilitasi Pertanyaan 3) Adanya mekanisme pelaporan 4) Adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu 5) Tersedianya laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses 6) Adanya pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.	Skala Likert
4	Pengelolaan ADD (Y2)	1) Akuntabilitas Kepemimpinan 2) Akuntabilitas Proses 3) Akuntabilitas Program 4) Akuntabilitas Kebijakan	Skala Likert

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Path Analysis

Uji *path analysis* secara *parsial* adalah untuk menguji bagaimana pengaruh langsung masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan t_{Hitung} dengan t_{Tabel} atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing t_{Hitung} .

Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat (X1) dan Kualitas Pengelola (X2) terhadap transparansi (Y1), analisa regresi linear berganda yang dapat digunakan. Pengujian pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat menggunakan perbandingan nilai t_{Hitung} dan nilai t_{Tabel} , jika t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka hipotesis dapat diterima atau jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu ditunjukkan persamaan jalur dan analisis koefisien determinasi R^2

Tabel 2. Output Hasil Regresi Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Pengelola Terhadap Transparansi

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.969	.839		1.155	.250
	PARTISIPASI MASYARAKAT	.138	.056	.195	2.453	.002
	KUALITAS PENGELOLA	.502	.066	.600	7.572	.000

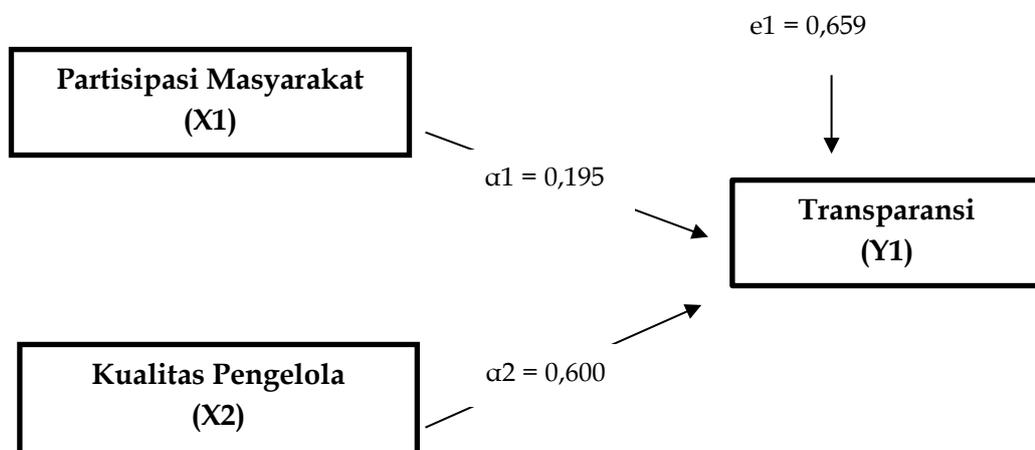
a. Dependent Variable: TRANSPARANSI

Berdasarkan tabel 4.17 di atas dapat dibuat persamaan jalur pertama sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + e_1$$

$$Y_1 = 0,195.X_1 + 0,600X_2 + e_1$$

Persamaan jalur pertama tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.751 ^a	.565	.558	1.626

a. Predictors: (Constant), KUALITAS PENGELOLA, PARTISIPASI MASYARAKAT

b. Dependent Variable: TRANSPARANSI

Berdasarkan table 4.19 di atas dapat diuraikan koefisien determinasi sebesar 0,565 atau 56,5% artinya bahwa besarnya pengaruh secara bersama-sama antara partisipasi masyarakat dan kualitas pengelola terhadap transparansi adalah sebesar 56,5% selebinya 43,5 % dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Berdasarkan nilai koefisien determinasi ini dapat dihitung $e1 = \sqrt{1 - 0,565} = 0,659$

2. Pengaruh langsung (Direct Effect)

Tabel 4. Pengaruh Total

Variabel independent	Variabel dependen	Simbol	Pengaruh langsung	Pengaruh tidak langsung	Pengaruh Total
Partisipasi masyarakat Kualitas PENGELOLA A	Transparansi	X1→ Y1	0,195	-	0,195
		X2→ Y1	0,600	-	0,60
Partisipasi masyarakat Kualitas PENGELOLA A Transparansi	Efektifitas Pengelolaan ADD	X1→ Y2	0,451	-	0,451
		X2→ Y2	0,442	-	0,442
		Y1→ Y2	0,338	-	0,338
		X1→ Y1 → Y2	0,451	0,195x0,338=0,066	0,517
		X2→ Y1 → Y2	0,442	0,600x0,338=0,203	0,645

Dari hasil tabel 4.25 bisa dilihat nilai yang paling dominan pengaruh langsung terhadap transparansi (Y1) adalah kualitas pengelola dengan nilai 0,60 sedangkan nilai yang paling dominan terhadap efektifitas pengelolaan ADD (Y2) ialah Partisipasi masyarakat dengan nilai 0,451 dan transparansi merupakan nilai yang paling kecil terhadap Efektifitas pengelolaan ADD (Y2) dengan nilai 0,338. Untuk pengaruh tidak langsung, nilai yang paling dominan yaitu pengaruh kualitas pengelola melalui transparansi terhadap efektifitas pengelolaan ADD dengan nilai 0,6448.

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan variabel partisipasi masyarakat (X1), kualitas pengelola (X2), transparansi (Y1) dan efektifitas pengelolaan ADD (Y2). Baik pengaruh langsung, tidak langsung dan pengaruh total dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut :

Tabel 5. Rangkuman hasil pengujian Hipotesis

No	Hipotesis	Nilai Beta koefisien	t _{tabel}	t _{hitung}	Sig	Hasil
1	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi	0,195	1,976	2,453	0,02	Positif dan signifikan
2	Kualitas pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi	0,600	1,976	7,572	0,00	Positif dan signifikan
3	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan ADD	0,451	1,976	6,66	0,00	Positif dan signifikan
4	Kualitas pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan ADD	0,442	1,976	5,361	0,00	Positif dan signifikan
5	Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas Pengelolaan ADD	0,338	1,976	4,540	0,03	Positif dan signifikan
6	Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan melalui transparansi terhadap efektifitas pengelolaan ADD		1,976	2,234		Positif dan signifikan
7	Kualitas pengelola berpengaruh positif dan signifikan melalui transparansi terhadap efektifitas pengelolaan		1,976	2,834		Positif dan signifikan

Pembahasan

Ada pun hasil hipotesis pengujian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Transparansi Pengelolaan ADD

Hasil pengujian pengaruh partisipasi masyarakat terhadap transparansi pengelolaan ADD, terlihat bahwa hasil analisa mendukung hipotesis pertama (H1) yakni partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan ADD. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan diikuti dengan semakin tingginya transparansi pengelolaan ADD, sebaliknya semakin kurang partisipasi masyarakat, maka akan diikuti dengan semakin kurangnya transparansi pengelolaan ADD.

2. Pengaruh Kualitas Pengelola terhadap Transparansi Pengelolaan ADD

Hasil pengujian pengaruh kualitas pengelola terhadap transparansi pengelolaan ADD, terlihat bahwa hasil analisa mendukung hipotesis kedua (H2) yakni kualitas pengelola

berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pengelolaan ADD. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas pengelola, maka akan diikuti dengan semakin tingginya transparansi pengelolaan ADD, sebaliknya semakin rendah kualitas pengelola, maka akan diikuti dengan semakin kurangnya transparansi pengelolaan ADD.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektifitas Pengelolaan ADD

Hasil pengujian pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan ADD, terlihat bahwa hasil analisa mendukung hipotesis ketiga (H3) yakni partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan ADD. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka akan diikuti dengan semakin tingginya efektifitas pengelolaan ADD, sebaliknya semakin kurang partisipasi masyarakat, maka akan diikuti dengan semakin kurangnya efektifitas pengelolaan ADD.

4. Pengaruh Kualitas Pengelola terhadap Efektifitas Pengelolaan ADD

Hasil pengujian pengaruh kualitas pengelola terhadap efektifitas pengelolaan ADD, terlihat bahwa hasil analisa mendukung hipotesis keempat (H4) yakni kualitas pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan ADD. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas pengelola, maka akan diikuti dengan semakin tingginya efektifitas pengelolaan ADD, sebaliknya semakin rendah kualitas pengelola, maka akan diikuti dengan semakin kurangnya efektifitas pengelolaan ADD.

5. Pengaruh Transparansi terhadap Efektifitas Pengelolaan ADD

Hasil pengujian pengaruh kualitas PENGELOLA terhadap efektifitas pengelolaan ADD, terlihat bahwa hasil analisa mendukung hipotesis kelima (H5) yakni transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan ADD. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi transparansi, maka akan diikuti dengan semakin tingginya efektifitas pengelolaan ADD, sebaliknya semakin kurang transparansi, maka akan diikuti dengan semakin kurangnya efektifitas pengelolaan ADD.

6. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Efektifitas Pengelolahan ADD melalui Transparansi

Hasil pengujian pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektifitas pengelolaan ADD melalui transparansi, terlihat bahwa hasil analisa mendukung hipotesis keenam (H6) yakni partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan ADD melalui transparansi. Artinya semakin baik partisipasi masyarakat maka akan diikuti dengan semakin tingginya transparansi yang berdampak pula dengan semakin tingginya efektifitas pengelolahan ADD, sebaliknya semakin kurang baik partisipasi masyarakat maka akan berdampak pada transparansi yang menurun dan tentunya akan diikuti dengan semakin rendahnya efektifitas pengelolaan ADD.

7. Pengaruh Kualitas Pengelola terhadap Efektifitas Pengelolahan ADD melalui Transparansi

Hasil pengujian pengaruh kualitas pengelola terhadap efektifitas pengelolaan ADD melalui transparansi, terlihat bahwa hasil analisa mendukung hipotesis ketujuh (H7) yakni

kualitas pengelola berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektifitas pengelolaan ADD melalui transparansi. Artinya semakin baik kualitas pengelola maka akan diikuti dengan semakin tingginya transparansi yang berdampak pula dengan semakin tingginya efektifitas pengelolaan ADD, sebaliknya semakin kurang baik kualitas pengelola maka akan berdampak pada transparansi yang menurun dan tentunya akan diikuti dengan semakin rendahnya efektifitas pengelolaan ADD.

SIMPULAN

Partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan mampu mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai pengelolaan ADD yang ada di desanya. Semakin bagus partisipasi masyarakat dan kualitas pengelolaan yang ada maka pengelolaan add yang ada pun akan semakin baik. Ditambah dengan adanya transparansi di tengah masyarakat membuat semua pengelolaan add menjadi lebih jelas dan terarah di kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah merekomendasikan kepada pihak desa-desa di Kecamatan Galesong mempertahankan dan lebih meningkatkan transparansi dalam pengelolaan ADD. Dimana di Kecamatan Galesong sudah mampu dalam mengelola ADD yang di berikan oleh pemerintah dan pengelolaan ADD tersebut lebih transparan atau terbuka terhadap masyarakat.

Referensi :

- Achmad Kuncoro, Engkus dan Riduwan. 2008. Cara Menggunakan Dan Memakai Analisis Jalur. Bandung : Alfabeta.
- Adi, Isbandirukminto. 2007. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat. Jakarta :PT Rajagrafindo Persada.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Agus Eko Sujianto. 2009. Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0. Jakarta : PT. Prestasi Pustaka.
- Aikins, S. K. (2011). An Examination of Government Internal Audit's Role in Improving Financial Performance. *Public Finance and Management*, 11, (4), 306- 337.
- Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government. Malang : Bayumedia Publising.
- Aprih, Santosodan Sri Widowati, 2011, Pengaruh Kualitas Pelayanan, Fasilitas dan Lokasi terhadap Keputusan Pembelian, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, No. 2, FE-USM, Halaman 179-190.
- Aprisiami, Putriyanti. 2012. Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Pugerjo.
- Ardhana, YM Kusuma. 2012. Menyelesaikan Website 30 Juta !. Jakarta : Jasakom.
- Astuti, T. P Dan Yulianto. 2016. Good Governace Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014. *Berkala akuntansi Dan Keuangan Indonesia*. 1(1): 1-14.

- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), 1173-1182.
- Baswir, Revrison. 1997. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE: Yogyakarta.
- Conyers, Diana. 1992. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Drs. H. Malayu, S.P. Hasibuan, 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta :Cetakan 9. PT. Bumi Aksara.
- Ghozali., Imam. 2009. *Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herison, R., Fachmi, M., & Ismail, I. K. (2021). Amkop Management Accounting Review (AMAR) Pengaruh Kualitas Layanan dan Promosi Penjualan terhadap Keputusan Pembelian Ulang pada Jasa Grab Food di Kota Makassar Abstrak. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 1(2), 24-31. <https://doi.org/10.37531/amar.v1i2.131>
- Hevesi, G. Alan. 2005. *Standards for Internal Control in New York State Government*. <http://www.osc.state.ny.us>.
- Husna, Saifatuldan Abdullah, Syukriy. (2016). Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun (2014) Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol. 1, 282-293.
- Indrawijaya Ibrahim Adam, *Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jati Diri Dan Karakter Bangsa Dalam Pembangunan Nasional*, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Istiqamah, S. 2015. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Aktabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*. 3(1): 1-18. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018 Edisi September*. http://um/3904027/2011_Ployhart_Moliterno_EmergenceofHumanCapital_MultileveIModel127.full_1_.pdf
- Jurniadi. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal* vol. 1, No. 1, Thn. 2015, Hlm 112-124.
- Lestari, Ayu Komang D, dkk. (2014). Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kututambahan Kecamatan Buleleng Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintah). *Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi*. Volume 2. Nomor 1.
- Mardiasmo (2013), *Reformasi Pengelolaan Keuangan Publik Menuju Akuntabilitas Publik*, Makalah yang disampaikan dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISES), Makasar 21-23 April 2000 Hal 248-265 No. 12
- Mahmudah, Siti. 2017. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)." Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ponorogo